

## **Kerjasama Publik - Swasta Krusial bagi Upaya Pemberantasan Korupsi**

*IPMG memfasilitasi komitmen kerjasama dengan para pemangku kepentingan utama dalam sektor kesehatan sebagai bagian dari komitmen IPMG untuk mendukung terbentuknya praktik pemasaran beretika bagi kepentingan pasien*

**Jakarta, 27 September 2014** – International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), sebuah organisasi nirlaba yang beranggotakan 24 perusahaan farmasi internasional berbasis riset yang beroperasi di Indonesia, hari ini mengumumkan komitmen kerjasama dengan para pemangku kepentingan utama dalam sektor kesehatan, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) dan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFarmasi), untuk mendukung usaha pemerintah dalam memberantas korupsi, terutama dalam sektor kesehatan. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari komitmen IPMG untuk menciptakan praktik pemasaran beretika yang diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Komitmen kerjasama ini digagas menindaklanjuti penandatanganan komitmen pemberantasan korupsi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Peraturan Kemenkes No. 14/2014 yang mengatur tentang gratifikasi, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan mekanisme pelaporan gratifikasi yang melibatkan pegawai negeri di lingkup Kementerian Kesehatan.

Undang-undang tentang anti korupsi telah memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai gratifikasi, yaitu: hadiah berbentuk apapun, berupa uang, barang, potongan harga, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, tur perjalanan, obat-obatan gratis, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di Indonesia atau di luar negeri melalui cara apapun.

Luthfi Mardiansyah, Ketua IPMG, mengatakan bahwa, "IPMG melihat pentingnya peran aktif kalangan pelaku bisnis dalam memberantas korupsi dan mendorong praktik pemasaran yang beretika demi masyarakat sebagai pasien. IPMG juga menyambut baik dan mendukung penuh keputusan Kementerian Kesehatan dalam menerbitkan Permenkes No. 14/2014 untuk memberantas gratifikasi dengan mengadakan sebuah diskusi guna mensosialisasikan Permenkes tersebut kepada para pemangku kepentingan terkait yang sejalan dengan komitmen seluruh anggota IPMG untuk selalu menaati kode etik praktik pemasaran serta menaati peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Permenkes No. 14/2014, sangatlah penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sektor kesehatan untuk mengetahui dan memahami tata cara dan

peraturan gratifikasi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Dengan membangun dan mendukung sebuah standar pedoman praktik (*code of conduct*) yang harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan dan juga memfasilitasi penyebaran informasi tentang pengalaman, serta *best practices* anti korupsi. IPMG sebagai mitra strategis pemerintah, meyakini bahwa hal ini akan mendorong terciptanya layanan kesehatan yang lebih baik dan profesional yang bermanfaat bagi seluruh rakyat sebagai pasien. "Kolaborasi yang efektif antara sektor pemerintah dan swasta merupakan faktor keberhasilan kita di masa mendatang," tambah Luthfi.

Setiap anggota IPMG mematuhi kode etik dalam praktik pemasaran dan memiliki komitmen untuk selalu menjalankan dan memegang teguh prinsip transparansi, serta etika dan integritas yang tertinggi dalam menjalankan operasinya di Indonesia.

Praktik tidak beretika seperti pemberian hadiah dan pemberian uang komisi kepada dokter yang memberikan resep obat-obatan produksi perusahaan-perusahaan farmasi tertentu kepada pasien harus dihilangkan. Perilaku tersebut tidak hanya merusak semangat persaingan sehat tapi juga mengancam akses para pasien untuk mendapatkan obat-obatan yang aman dan efisien, serta menurunkan kualitas layanan dan merusak kredibilitas pemerintah.

"Sektor publik dan swasta tidak dapat bertindak sendirian dalam memberantas korupsi di Indonesia," kata Luthfi, seraya menambahkan bahwa upaya memberantas praktik akan jauh lebih efektif bila didukung dengan kerjasama yang solid antara sektor publik (pemerintah) dan swasta. IPMG berharap komitmen kerjasama ini dapat mencerminkan dukungan kalangan pebisnis yang bergerak di sektor kesehatan tapi juga tekad yang kuat untuk melakukan upaya nyata dalam memberantas korupsi di Indonesia yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan bagi pasien.

**-Selesai-**

## **Tentang IPMG**

IPMG adalah organisasi nirlaba yang beranggotakan 24 perusahaan farmasi multinasional berbasis riset yang beroperasi di Indonesia. IPMG secara resmi terbentuk pada bulan Agustus 2002. Anggota IPMG dan kantor pusat mereka secara terus-menerus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk dapat menghadirkan di Indonesia obat-obatan inovatif yang aman dan memenuhi standar kualitas internasional. Sejak 1999 anggota IPMG telah memperkenalkan lebih dari 250 obat-obatan baru untuk penyakit kanker, penyakit infeksi, penyakit jantung serta berbagai penyakit lainnya. Anggota IPMG kini memperkerjakan sekitar 10.000 karyawan untuk mendukung kegiatan operasional mereka di Indonesia. IPMG berupaya memberantas peredaran obat palsu melalui kampanye penyadaran masyarakat atas risiko bahaya obat palsu. IPMG adalah anggota aktif dari International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

**Kontak Media:**

**Naomi Juliandary**

*Communications Manager*

**International Pharmaceutical**

**Manufacturers Group**

T: +62 21 769 7531

F: +62 21 769 7532

E: [Naomi.Juliandary@ipmg-online.com](mailto:Naomi.Juliandary@ipmg-online.com)

M: +62 856 933 20 156

**Dewi Nuraini**

*Associate*

**Burson-Marsteller**

T: +62 21 5296 3880

F: +62 21 5296 3881

E: [Dewi.Nuraini@bm.com](mailto:Dewi.Nuraini@bm.com)

M: +62 856 780 0792